TAFSIR KEBUDAYAAN TERHADAP IDE SUKARNO TENTANG SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA: DARI SOSIO-ANTROPOLOGI KE PANDANGAN SUFISTIK

Oleh: Ali Usman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**I. Pendahuluan**

Tanggal 16 Juni 1958, di istana negara, Presiden Sukarno, yang saat itu menyampaikan pidato tentang dasar negara Pancasila, sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, merasa kecewa, dan sepertinya juga tersinggung, bahkan “marah”. Apa pasal? Sukarno, menurut pengakuannya, dituduh mengkerdilkan Islam dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Sukarno, menurut para pengkritiknya itu, dianggap kurang mendalam saat menggali nilai-nilai filosofis budaya bangsa. Sebab, jika Sukarno melakukan kajian yang lebih mendalam lagi, kata mereka yang mengkritiknya, bukanlah Pancasila, tetapi Islam.

Atas tuduhan itu, Sukarno lantas menjelaskan secara empatik perihal ini. Berikut saya kutip pernyataan Sukarno yang diterbitkan oleh PSP UGM (2013), berjudul *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila*.

Ada orang berkata: pada waktu Bung Karno mempropagandakan Pancasila, pada waktu ia menggali, ia menggalinya kurang dalam. Terang-terangan yang berkata demikian dari pihak Islam. Dan saya tegaskan saya ini orang Islam, tetapi saya menolak perkataan bahwa pada waktu saya menggali di dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia kurang dalam menggalinya. Sebab dari pihak Islam dikatakan, jika Bung Karno menggali dalam sekali, ia akan mendapat dari galiannya itu, Islam. Kenapa kok Pancasila? Kalau ia menggali dalam sekali, ia akan mendapat hasil dari penggaliannya itu, Islam.

Saya ulangi, saya adalah orang yang cinta kepada Islam. Saya beragama Islam. Saya tidak berkata saya ini orang Islam yang sempurna, tidak. Tetapi saya Islam. Dan saya menolak tuduhan bahwa saya menggali ini kurang dalam. Sebaliknya saya berkata: penggalian saya itu sampai zaman sebelum ada agama Islam. Saya gali sampai zaman Hindu dan pra-Hindu.[[1]](#footnote-1)

Apa yang dialami oleh Sukarno di atas, sebenarnya merupakan fenomena aktual sepanjang masa, sebab sampai sekarang pun, gangguan terhadap Pancasila dengan berbagai macam tuduhan hingga berujung pada penolakan, muncul gerakan hendak menggantikan Pancasila dengan ideologi tertentu, masih tetap ada, meski itu aspirasi minor. Itulah pentingnya melakukan reaktualisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Bagaimana sebenarnya argumen “primordial”, saat Pancasila ini lahir, termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Karena itulah, penting mengemukakan kembali tentang persoalan ini melalui argumen Sukarno yang menjadi pelopor lahirnya Pancasila, sambil juga melakukan kontekstualisasi terhadap isu-isu aktual era sekarang.

**II. Pembahasan**

**Sosio-antropologi Ketuhanan Yang Maha Esa**

Makna Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya, jika mengacu pada argumen filosofis yang dikemukakan oleh Sukarno, tidak murni teologis atau semata-mata dapat dimaknai secara teologis, sebagaimana dipahami kalangan pemuka agama. Ketuhanan Yang Maha Esa justru erat hubungannya dengan kerangka pemikiran sosio-antropologi.

Ini penting dijelaskan agar tidak ahistoris, yang seolah, upaya memahami Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan dimensi teologi, meski juga tidak sepenuhnya salah. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa, agar lebih terjaga dari distorsi, perlu dipahami—meminjam istilah Clifford Geertz (1992), berdasarkan “tafsir kebudayaan” (*interpretation of cultures*).[[3]](#footnote-3)

Alhasil, berdasarkan analisa sosio-antropologis, Sukarno mengemukakan makna Ketuhanan Yang Maha Esa dari lubuk budaya asli Indonesia secara evolutif. Masyarakat Indonesia, kata Sukarno, mengalami apa yang dalam istilahnya disebut evolusi secara sosiologis—seperti evolusi dalam kajian biologi. Evolusi masyarakat Indonesia itu digambarkan “bersaf-saf”, berbaris dan berlapis, mulai dari apa yang disebutnya sebagai saf pra-Hindu, saf Hindu, saf Islam, saf imperialis.

Jadi, saya menggali itu dalam sekali, sampai ke *saf* pra-Hindu. Datang *saf* zaman Hindu, yang di dalam bidang politik berupa negara Taruma, negara Kalingga, negara Mataram kesatu, negaranya Sanjaya, negaranya Empu Sendok, negara Kutai, berupa Sriwijaya dan lain sebagainya. Datang *saf* lagi, *saf* zaman kita mengenal agama Islam, yang di dalam bidang politik berupa negara Demak Bintoro, negara Pajang, negara Mataram kedua, dan seterusnya. Datang *saf* lagi, *saf* yang kita kontak dengan Eropa, yaitu *saf* imperialis, yang di dalam bidang politiknya zaman hancur-leburnya negara kita, bahkan kita menjadi rakyat yang *verpauveriseerd.* [[4]](#footnote-4)

Mengikuti alur pemikiran Sukarno di atas, berikut ini penjelasan detailnya, tentang perkembangan atau evolusi “manusia Indonesia”—meminjam istilah Mochtar Lubis.[[5]](#footnote-5) Dalam upaya memahami prinsip Ketuhanan, Sukarno mengajak kita menengok ke masa lalu yang sangat jauh, pada masa primitif hingga modern.

Pertama, disebut era berburu. Fase ini oleh Sukarno disebut kehidupan manusia sebagai manusia, yang hidupnya di dalam gua, mencari penghidupan dengan berburu dan mencari ikan. Memburunya tidak menggunakan senjata, tapi di zaman dahulu menggunakan batu atau kayu.

Cara hidup di fase ini penting diketahui. Alam pikiran manusia di segala zaman, menurut Sukarno, dipengaruhi oleh cara hidupnya, oleh cara ia mencari makan dan minum. Ia mempengaruhi alam pikir(an)nya. Hidup dalam gua-gua, di bawah pohon-pohon, mencari makan dengan memburu dan mencari ikan.

Sejalan dengan apa yang pernah diungkap oleh Geertz, bahwa pikiran adalah sebuah istilah yang menunjukkan sekelompok keterampilan, kecondongan, kemampuan, kecenderungan, dan kebiasaan-kebiasaan. Pikiran bukanlah sebuah tindakan atau juga bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah sistem yang tersusun dari disposisi-disposisi yang menemukan pengejawantahannya di dalam beberapa tindakan dan benda.[[6]](#footnote-6)

Lalu, bagaimana dengan konsep Ketuhanan di era ini? Sukarno menyebutnya sebagai “Tuhan manusia”, bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan dalam fase ini diselimuti oleh hal-hal antroposentris, yang menisbatkan Tuhan kepada benda atau bahkan orang.

Fase pertama itu, Tuhan manusia. Saya ulangi, bukan Tuhan yang sebenarnya, yang tepat. Dia punya *begrip* itu, menusia mengira Tuhan guntur, Tuhan air sungai, Tuhan angin. Contoh dari *restan-restan* kepercayaan ini tadi saya sebutkan. Di India orang masih menyembah sungai Gangga. Di Jawa *lampor.* Zaman dulu orang Yogyakarta kalau ada angin dari selatan meniup kandang dari selatan mereka teriak *lampor, lampor, lampor!* Bahkan di kota Yogyakarta orang pasang lentera di luar rumah.[[7]](#footnote-7)

Kedua, era beternak, suatu pertumbuhan yang disebutnya evolusioner. Manusia yang tadinya hidup dari perburuan dan mencari ikan, mulai mengerti bahwa ternak bisa dipelihara. Yang tadinya memburu binatang, timbul pengetahuan bahwa binatang-binatang itu bisa ditangkap, diikat, dikurung, anaknya dipelihara, dan berkembang biak.

Dengan memelihara binatang, setelah ia meninggalkan adat kebiasaannya berburu, dan kemudian beternak, orang-orang di era ini terikat pada tempat, kepada ternaknya. Mereka harus memberi makan kepada ternak itu. bukan saja memberi makan kepada diri sendiri berupa daging, misalnya, tetapi juga harus memberi makan kapada ternak. Kemudian juga sadar, bahwa makanan yang ia konsumsi dan yang diberikan kepada ternak, bisa pula dicocok-tanamkan.

Karena manusia menggantungkan hidupnya dari peternakan, tidak heran, jika konsep Ketuhanan dalam fase ini, menurut Sukarno, menamakan Tuhan-Tuhan mereka berupa binatang.

Fase kedua, manusia hidup dari peternakan. Pindah bentuknya ia punya Tuhan, terutama sekali berupa binatang. Oleh karena binatanglah yang memberi susu, daging, dan kulit kepadanya. Oleh karena hidupnya sebagian besar tergantung kepada binatang. Ia punya Tuhan lantas masih menyembah batu: masak batu disembah, pohon disembah, sungai disembah, ini Tuhan yang betul, berupa binatang.

Bangsa Mesir zaman dulu menyembah binatang, sapi yang bernama *Apis,* atau burung yang bernama *Osiris.* Bahkan di India sampai sekarang masih ada *restan* penyembah binatang. Di daerah yang masih memegang adat kuno, jika saudara mengganggu seekor sapi, saudara dibunuh. Sapi adalah binatang keramat. Begitu keramatnya sampai tahi sapi dikeramatkan.[[8]](#footnote-8)

Ketiga, era pertanian atau bercocok tanam. Dalam hal ini, Sukarno memuji dan mengapresiasi kaum perempuan. Sebab, perempuanlah menurut Sukarno makhluk pertama yang mengusahakan tanaman. Seorang perempuan, ketika melihat biji jagung yang tidak termakan, tumbuh dan ia melihat kalau biji jagung ini bisa ditanam, dan berbuah. Demikian pula biji padi, dan juga tanaman-tanaman yang lain.

Perempuan, melalui kemampuannya bercocok tanam, bahkan oleh Sukarno disebut sebagai orang yang melahirkan peradaban (*civilization*).

Salah satu jasa dari wanita ialah dialah yang pertama kali memperoleh ilmu pertanian. Sebagaimana juga sebenarnya wanita yang pertama kali mendapatkan ilmu menjahit, membikin pakaian.

Wanita yang pertama kali membuat apa yang kita namakan rumah, belum rumah seperti sekarang, meskipun rumah desa pun. Sangat sederhana. Wanita yang ditinggalkan suaminya ke hutan atau menggembala tinggal dengan anaknya. Hujan. Kemudian timbul pikiran menyusun daun-daun pisang atau lainnya untuk bernaung di bawahnya. *Begrip* pertama daripada atap. Jadi wanita adalah makhluk yang pertama yang mendapatkan yang dinamakan *civilization,* peradaban. Wanita yang membuat priuk, wanita yang menjahit kulit, wanita yang menganyam serat menjadi tanunan kasar. Wanita yang bercocok tanam mula-mula.[[9]](#footnote-9)

Karena manusia di era ini menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, maka timbullah kepercayaan kepada suatu Zat yang menguasai pertanian, seperti nama Dewi Laksmi, Dewi Sri, Saripohaci di tanah Pasundan, dewi-dewi yang memberkati pertanian. Ini adalah salah satu corak dari tiap bangsa agraris.

Keempat, era kerajinan, yang ditandai oleh cara hidup nomaden menjadi menetap, lalu muncul ide ketika pertanian sudah semakin massif, terdapat kelompok yang membuat alat bertani. Cangkul, linggis, gerobag, contohnya, meski masih dengan bahan dan bentuk sederhana.

Kelompok pengrajin itu kemudian membentuk kelas sosial tersendiri. Membuat alat, membuat gerobag, membuat pacul, membuat bajak, membuat pedang, dan lain-lain. Hidupnya membuat alat, yang hasilnya ditukarkan (barter) dengan hasil pertanian.

Di era ini, muncul pertanyaan, siapa yang menjadi penentu dari kemampuan manusia yang bisa membuat alat pertanian? Menurut Sukarno, akallah yang melahirka ide untuk membuat alat pertanian. Akal memiliki peran besar dalam membuat cangkul, gerobag, linggis, dan lain sebagainya. Objek mengenai Tuhan mulai bergeser, dari yang tampak, fisik, berubah menjadi gaib.

Tuhan manusia di dalam taraf keempat ini, adalah terutama bersarang di sini, di akal. Yang tadinya berupa batu pindah berupa sapi, berupa dewi, di dalam alam keempat itu menjadi gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba.

Alam keempat gaib, Tuhan dimasukkan di dalam alam gaib. Tuhan di mana? Tidak kelihatan tidak bisa mata melihatnya. Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, gaib, oleh karena akallah menjadi penentu daripada hidup manusia. [[10]](#footnote-10)

Kelima, era industrialisme, yang ditandai oleh produksi, mesin, dan buruh. Konsep Ketuhanan melampaui era yang gaib di era kerajinan. Di era ini, menurut Sukarno, manusia merasa dirinya atau sebagian dari manusia merasa sebagai Tuhan. Di era ini, semua bisa dilakukan oleh kemajuan teknologi. Sukarno mencontohkan seperti rekayasa hujan, teknologi alat komunikasi atau pesan suara, hingga membuat petir melalui tenaga listrik.

Sampai di sini, dapatlah dipahami bahwa orang-orang Indonesia sejak dahulu kala telah memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Pada setiap fase kehidupan, sebagaimana telah digambarkan di atas, kita bisa melihat dan memahami secara utuh tentang karakter masyarakat Indonesia, yang menurut Sukarno “selalu hidup di dalam alam pemujaan dari sesuatu hal yang kepada hal itu ia menaruhkan segenap harapannya, kepercayaannya”.[[11]](#footnote-11)

Itulah yang mendasari sila I Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski demikian, pemikiran Sukarno tentang ketuhanan itu, merupakan bagian dari pengalaman hidupnya, yang secara bersamaan sebagai proses dalam “menemukan” Tuhan. Ahmad Noto Soetarjo telah mendokumentasikan perjalanan Sukarno dalam mencari Tuhan, yang dituangkan ke dalam buku berjudul, *Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan,* terbit tahun 1993.[[12]](#footnote-12)

Sukarno, menurut sebagian pendapat, mulai tertarik memikirkan tentang masalah ketuhanan sejak berjumpa dan bertukar pikiran dengan Agus Salim.[[13]](#footnote-13) Itu pun tidak sengaja, sebab secara kebetulan, Sukarno dan Agus Salim bertemu di Bandung, dan semula yang dibicarakan adalah tema pergerakan dan masalah politik. Namun rupanya beralih pada tema lain, yaitu ketuhanan.

Selain Agus Salim, terdapat juga nama Pastor Van Lith, yang menjadi perantara bagi Sukarno memiliki pandangan yang khas tentang ketuhanan. Agus Salim maupun Van Lith, waktu itu, memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan Sukarno, sehingga memunculkan perdebatan di antara mereka. Situasi ini bagi Sukarno semakin memicu semangatnya untuk mencari dan menemukan konsep ketuhanan perspektif dirinya sendiri.

Meskipun pada akhirnya Sukarno berlabuh pada agama Islam, tetapi cara pandang dan pemikiran keislaman Sukarno sangat khas. Sukarno tidak pernah memperoleh didikan agama Islam dari orangtuanya, dan juga dari tokoh sentral agama, seperti seorang kiai atau ustadz. Sukarno, menurut Soetarjo, mengaku jiwanya sendiri yang mencari Tuhan dan pada akhirnya menemukannya.[[14]](#footnote-14) Sukarno mengaku sebelumnya tidak mengenal agama dan mengenal Tuhan secara formal berdasarkan pemahaman agama tertentu, tetapi kemudian ia mendapatkannya.

**Mengapa Sukarno?**

Muncul pertanyaan, apa pentingnya menjelaskan makna Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Sukarno? Apakah sejarah kemerdekaan RI, termasuk perumusan dasar negara Pancasila, identik dengan Sukarno? Jawaban “iya” atau “tidak”, sebenarnya tidaklah penting dan tidak mempunyai konsekuensi ancaman yang membahayakan bagi NKRI. Namun Sukarno telah menepis anggapan ini, meski ia sadar sebenarnya dapat mengharumkan namanya dan termasuk pula kepada anak keturunannya. Sukarno tidak menginginkan pengkultusan terhadap dirinya.[[15]](#footnote-15)

Pertama, dalam hubungannya dengan perumusan Pancasila. Sukarno menolak predikat yang diberikan oleh Prof. Mr. Notonagoro saat pengukuhan *Doctor Honoris Causa* di UGM sebagai “pencipta Pancasila”, tetapi ia lebih setuju sebagai “penggali Pancasila*”.*

Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali.[[16]](#footnote-16)

Kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, semua etnis dan penganut agama, tidak ada yang merasa paling berjasa, termasuk Sukarno sendiri.

… Tetapi jikalau ada yang berkata: Bung Karno yang mengadakan republik Indonesia. Tidak benar! Jangan pun satu Soekarno, sepuluh Soekarno, seratus Soekarno, seribu Soekarno tidak akan bisa membentuk negara Republik Indonesia, jikalau segenap rakyat jelata Republik Indonesia tidak berjuang mati-matian! Kemerdekaan adalah hasil dari segenap perjuangan.[[17]](#footnote-17)

Meski demikian, memang tidak dapat dipungkiri, Sukarno yang menurut pengakuannya telah terlibat dalam gelanggang perjuangan kemerdekaan sejak usia 18 tahun memang sangat dominan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, baik proses negosiasi politik maupun secara taktis pada perumusan dasar negara Pancasila. Itulah sebabnya, sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dari kaum penjajah tidak bisa dilepaskan dari peran diplomatik dan strategi jitu yang digencarkan oleh Sukarno.

Sukarno selalu tampil mempesona, dan ia memang dikenal sebagai orator ulung. Saat menyampaikan isi pidatonya yang fenomenal, 1 Juni 1945, komunikasi politiknya mampu menyihir peserta sidang BPUPK. Termasuk pula, dalam pidatonya itu, ia mengajukan prinsip ketuhanan, yang di kemudian hari menjadi sila I Pancasila, Keutahanan Yang Maha Esa.[[18]](#footnote-18)

Makna dari prinsip Ketuhanan ini, menurut Sukarno bukan saja bangsa Indonesia (yang) bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Bertuhan secara kebudayaan dan berkeadaban. Bagaimana maksudnya? Terangkum dalam ungkapan Sukarno berikut:

Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’…. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain).[[19]](#footnote-19)

Dari penjelasan di atas, dapatlah dimengerti secara eksplisit, bahwa apa yang disebutnya sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan” pada pidato Sukarno 1 Juni 1945, tidak memiliki arti negatif seperti anggapan pelecehan terhadap agama. Sebaliknya, justru sangat positif, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang ironisnya, kadang tidak mampu ditangkap oleh mereka yang hatinya dipenuhi oleh kebencian.

Prinsip yang diuraikan Sukarno tentang Ketuhanan yang Berkebudayaan, menurut Syamsul Hadi, sebagaimana dikutip oleh Paisol Burlian,[[20]](#footnote-20) adalah agar bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan Tuhannya sendiri-sendiri. Negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinan Sukarno telah berpikir ke depan bahwa negara harus memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya, sebagaimana tuntutan hak-hak asasi manusia.

**Memaknai “Yang Esa”**

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya mengalami dinamika dalam sebuah diskursus sosial-politik, dari sejak Panitia Sembilan melangsungkan rapat pada 22 Juni 1945 dan berhasil merumuskan sila I dan menjadi dokumen Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, hingga diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Perubahan ini telah menjadi konsensus nasional.

Meski demikian, penerimaan terhadap perubahan itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pertama, adalah Ki Bagus Hadikusomo, di antara tokoh dari kalangan Islam perumus Pancasila, Ketua PP Muhammadiyah aktif (1942-1953), sebagai anggota sidang BPUPK yang terakhir menerima sila I, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, berdasarkan revisi dari sila I versi piagam Jakarta yang menyebutkan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mengapa demikian?

Ki Bagus Hadikusumo semula menolak perubahan itu, tetapi setelah diyakinkan oleh rekan seperjuangannya, Teuku Muhammad Hassan, KH Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimedjo, bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dimaknai sebagai konsep tauhid.[[21]](#footnote-21)

Sejak itulah, para pendiri bangsa kita memiliki kesamaan persepsi, yaitu keseluruhan nilai-nilai sila dalam Pancasila sangat cocok dengan prinsip-prinsip universal semua agama, norma adat, seperti konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan sosial, dan karenanya tidak relevan jika kemudian hari-hari ini sebagian kalangan berusaha membenturkan keduanya (Pancasila dan Islam).

Syariat Islam dapat diimplementasikan di Tanah Air tetapi tidak dalam bentuk formal. Lewat Pancasila, kata Sukarno, bungkusnya memang tidak dari agama tertentu, tetapi isi yang terkandung di dalamnya terinspirasi dari agama dan tradisi leluhur bangsa, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan. Pancasila dalam perspektif Islam, dapat dikatakan sebagai syariat (aturan main, ketentuan) itu sendiri. Saya menyebutnya, “Syariat Pancasila”.[[22]](#footnote-22)

Kedua, tentang penerimaan terhadap Pancasila, termasuk di dalamnya Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pengalaman umat muslim dimaknai sebagai konsep tauhid, mengesakan Allah Swt. Penafsiran ini tentu saja boleh, sah, dan tidak salah. Namun sebenarnya, jika benar-benar mengacu pada arti kata “Esa”, tidak sepenuhnya tepat diidentikkan dengan konsep tauhid.

Kata Esa (Sansekerta/Pali) bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah; berasal dari kata “*etad*” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata ini (*this,* Inggris). Sedangkan kata “satu” dalam pengertian jumlah atau nominal adalah “Ika”. Jadi, jika yang dimaksud dalam sila I Pancasila adalah jumlah Tuhan yang satu, maka seharusnya “Ika”, bukan “Esa”.[[23]](#footnote-23)

Itulah sebabnya, beda makna antara “Ika” (pada Bhineka Tunggal Ika) dengan “Esa” (pada sila I Pancasila) yang artinya sama-sama “satu”. Mengapa tidak Bhineka Tunggal Esa, atau Ketuhanan Yang Maha Ika?

Penjabaran dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa tertuang dalam UUD 1945, misalnya tentang kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28E mengatakan, bahwa “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal ayat (2) juga berbunyi senada: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Makna “Yang Esa” dalam pengertian lain lebih tepat jika dipahami sebagai “Realitas Yang Tinggi”, “Maha Segalanya”, dan lain-lain yang sepadan dengannya. Pemaknaan ini membuka akses yang sangat lebar bagi siapa saja, tidak hanya agama-agama “formal”, tetapi juga kepada semua penganut kepercayaan/penghayat, atau siapa saja yang meyakini sesuatu dan dianggapnya sebagai “Yang Esa”.

Yang Esa merupakan objek iman, yang pengalaman masing-masing orang tidak bisa disamakan satu sama lain. Yang Esa, jikalah diterjemahkan menjadi Tuhan menurut keyakinan dan kepercayaan agama-agama, tidaklah sederhana memahaminya. Tuhan, dalam ungkapan Muhammad AL-Fayyadl sebagai sesuatu yang bahkan tak layak disebut “sesuatu”. Mengangkat “Tuhan” menjadi tema perbincangan bukan saja sulit, tapi tampak mustahil lantaran pengalaman masing-masing orang dalam berjumpa dengan tuhannya tak sama, dan tak mungkin sama.[[24]](#footnote-24)

Dalam fenomenologi agama, sebagaimana terungkap oleh Rudolph Otto, disebutkan ada dua situasi pertemuan manusia dengan Tuhan-Nya. Dalam situasi pertama, Tuhan tampil di hadapan manusia sebagai suatu “misteri yang menggentarkan” (*mysterium tremendum*). Pada situasi lainnya, Ia hadir sebagai “misteri yang memesonakan” (*mysterium fascinans*).[[25]](#footnote-25)

Kondisi ini menggiring pada peninjauan kembali bentuk iman atau tauhid kepada Tuhan, yang dipahami para teolog atau agamawan mengambarkan Zat-Nya seolah jelas dan “berbentuk”; Tuhan diciptakan dalam ide dan konsep yang terpatri dalam benak manusia. Padahal, Tuhan dalam bentuk seperti itu, menurut sebagian pandangan kaum sufi, sebenarnya adalah “Tuhan kepercayaan”, bukan “Tuhan Yang-Sebenarnya”.

Ibn ‘Arabi mengkritik orang yang memutlakkan, atau jika boleh “menuhankan” kepercayaannya kepada Tuhan, yang menganggap kepercayaannya itu sebagai satu-satunya yang benar dan menyalahkan kepercayaan orang lain. Orang seperti itu memandang bahwa Tuhan yang dipercayainya itu adalah Tuhan yang sebenarnya, yang berbeda dengan Tuhan yang dipercayai oleh orang lain yang dianggapnya salah. Ibn ‘Arabi menyebut Tuhan yang dipercayai manusia sebagai “Tuhan kepercayaan” (*al-Ilah al-mu’taqad*), “Tuhan yang dipercayai” (*al-Ilah al-mu’taqad*), “Tuhan dalam kepercayaan” (*al-Ilah fi al-‘i’tiqad*), “Tuhan kepercayaan” (*al-Haq al-i’tiqadi*), atau “Tuhan yang diciptakan dalam kepercayaan” (*al-Haq al-makhluq fi al-i’tiqad*).[[26]](#footnote-26)

Di sinilah, membicarakan “Yang Esa” dalam arti “Realitas Tertinggi” memiliki relevansi. Iman kepada “Yang Esa”, dalam ungkapan Ibn ‘Arabi, adalah sebuah (peng)-ikatan (*binding*) dan (pem)-batasan (*delimitation*) Wujud Yang Tak Terbatas, Wujud Absolut (*al-Wujud al-Mutlaq*), yang dilakukan oleh dan berlangsung dalam subjek manusiawi, sehingga dengan begitu, Tuhan sebagaimana dia sebenarnya, Tuhan pada diri-Nya, Zat Tuhan, tidak diketahui dan tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Tuhan dalam arti ini oleh Ibn ‘Arabi disebut “Tuhan Yang Sebenarnya”, “*the Real God*” (*al-Ilah al-Haq*); “Tuhan yang Absolut”, “*the Absolute God*” (*al-Ilah al-Mutlaq*); dan “Tuhan Yang Tidak Diketahui”, “*the Unknown God*” (*al-Ilah al-Majhul*). Inilah makna tersembunyi dari ayat: “*Sesuatu pun yang serupa dengan-Nya”* (QS. As-Syura: 11) dan, “*Penglihatan tidak dapat mempersepsi-Nya, tetapi Dia mempersepsi semua penglihatan*” (QS. Al-An’am: 103)*.*[[27]](#footnote-27)

Pengetahuan tentang Tuhan dengan pendekatan seperti ini kemudian disebut “teologi apofatik“, atau suatu pendekatan yang dalam filsafat agama biasa disebut *via negativa* (teologi negartif), yaitu tidak ada kata atau sesutau pun yang mampu mendeskripsikan-Nya karena apa pun yang kita deskripsikan dapat dipastikan tidak akan sama dengan-Nya. Tuhan tidak bisa dikatakan memiliki sifat apapun yang bisa dinyatakan secara positif.

Penafsiran terhadap “Yang Esa” sebagai Tuhan menurut agama-agama, lebih karena kepentingan praktis untuk meyakinkan umat, kalau antara Pancasila sila I memiliki kesamaan prinsip dengan tauhid, misalnya dalam Islam. Di samping itu, penafsiran “Yang Esa” yang diidentikkan dengan konsep Tuhan, juga tidak bisa dilepaskan dari usaha negara untuk mengkanalisasi agama-agama yang dianggap “resmi” dan “tidak resmi”.

Hal itu berkaitan dengan pendisiplinan data penduduk. Di luar itu, pemahaman terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti semua pendudukan Indonesia berketuhanan, dapat tersentuh religiusiasnya, sehingga tidak perlu menonjolkan apa yang oleh Kamaruddin disebut, *having a religion-*nya.[[28]](#footnote-28) Melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa *promising and challenging,* bukan sekadar formalitas lahiriah keagamaan semata.

**III. Simpulan**

Tafsir kebudayaan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa memungkinkan untuk tahu makna yang sebenarnya, sebagaimana dimaksudkan oleh salah satu perumusnya, dalam hal ini Sukarno. Dalam uraiannya itu, tampak Sukarno sebagai negarawan yang memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luas. Ia bahkan bertindak layaknya seorang ilmuan, akademisi, sejarawan, saat memetakan perkembangan ilmu dan peradaban manusia Indonesia, yang di dalamnya muncul kepercayaan kepada Tuhan.

 Sukarno telah meninggalkan warisan berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang diuraikannya tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa itu, dari aspek sosio-antropologi ke pandangan sufistik, menjadi pijakan, yang kemudian diterjemahkan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Fayyadl, Muhammad. “Melanggar Batas-batas Bahasa: Derrida tentang Agama dan Tuhan”, dalam *Makalah,* tidak dipublikasikan.

Aristin, Rini. “Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi”, dalam *Jurnal* *al-Ibrah,* Vol. 1, No. 1, Desember 2016.

Bagir, Haidar. “Pengantar”, dalam John D. Caputo. *Agama Cinta Agama Masa Depan,* terj. Martin Lukito Sinaga. Bandung Mizan, 2003.

Burlian, Paisol. “Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila”, dalam <https://www.google.co.id/search?q=pemikiran+soekarno+dalam+perumusan+pancasila&sxsrf=APq-WBt3G0u6EFpFM9cGDvIkojNcnKRkEQ%3A1644205492285&source=hp&ei=tJUAYsmjD77cz7sPtYajmAg&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgCjxGLI4mE2Qot7boqXb_fNrV6yos3W&oq=&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ1AAWABgtQpoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCwAQo&sclient=gws-wiz>, 2020.

Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan,* terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Kamaruddin, “Dimensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif HAM Islam”, dalam *Inright: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia,* Vol. 3, No. 1, 2013.

Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia,* cet. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Noer, Kautsar Azhari. *Tasawuf Perenial, Kearifan Kritis Kaum Sufi.* Jakarta: Serambi, 2003.

Soekarno. *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila*. Yogyakarta: PSP UGM, 2013.

Soetarjo, Ahmad Noto. *Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan.* Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghitung Sejarah Revolusi Indonesia, 1993.

Syarifuddin, “Tuhan dalam Pergulatan Pemikiran Soekarno”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2013.

Usman, Ali. “Dinamika Internal Muhammadiyah dalam Penerimaan Pancasila”*,* dalam <https://alif.id/read/ali-usman/dinamika-internal-muhammadiyah-dalam-menerima-pancasila-b224203p/>

\_\_\_\_\_\_\_. “Generasi Muda Menjaga Bhineka Tunggal Ika”*,* dalam <https://jalandamai.net/generasi-muda-menjaga-bhineka-tunggal-ika.html>

\_\_\_\_\_\_\_. “Memantapkan Syariat Pancasila”, dalam <https://jalandamai.org/memantapkan-syariat-pancasila.html>

\_\_\_\_\_\_\_. “Soekarno dan Islam dalam Pidato 1 Juni 1945”*,* dalam <https://iqra.id/soekarno-dan-islam-dalam-pidato-1-juni-1945-226132/>

 \_\_\_\_\_\_\_. “Soekarno dan Kemerdekaan”*,* dalam <https://langgar.co/soekarno-dan-kemerdekaan/>

1. Lihat Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno Tentang Pancasila*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2013), hlm. 98-99. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Rini Aristin, “Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi”, dalam *Jurnal* *al-Ibrah,* Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 127. <https://www.google.co.id/search?q=AKTUALISASI+SILA+KETUHANAN+YANG+MAHA+ESA+DI+ERA+REFORMASI&sxsrf=APq-WBv4lW7knWULCLESqJ3fPxKU6n_Dzg%3A1644211423451&source=hp&ei=36wAYs6uGfyQseMPuuqn-AI&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgC679z4fQnxBzFg02BessClYYFP-XOc&ved=0ahUKEwiOmtDu7Oz1AhV8SGwGHTr1CS8Q4dUDCAY&uact=5&oq=AKTUALISASI+SILA+KETUHANAN+YANG+MAHA+ESA+DI+ERA+REFORMASI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEUABYAGCVDGgAcAB4AIABfIgBfJIBAzAuMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz>, diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan,* terj. F. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm. 100. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia,* cet. 2. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012). [↑](#footnote-ref-5)
6. Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan,* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara,* hlm. 108. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* hlm. 108-109. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,* hlm. 109. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.,* hlm. 110. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* hlm. 111. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Ahmad Noto Soetarjo, *Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan,* (Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghitung Sejarah Revolusi Indonesia, 1993). [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Syarifuddin, “Tuhan dalam Pergulatan Pemikiran Soekarno”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2013, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat Ali Usman, “Soekarno dan Kemerdekaan”, dalam <https://langgar.co/soekarno-dan-kemerdekaan/>, diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara,* hlm. 44. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Ali Usman, “Soekarno dan Islam dalam Pidati 1 Juni 1945”, dalam <https://iqra.id/soekarno-dan-islam-dalam-pidato-1-juni-1945-226132/>, diakses 22 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara,* hlm. 33. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Paisol Burlian, “Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila”, dalam <https://www.google.co.id/search?q=pemikiran+soekarno+dalam+perumusan+pancasila&sxsrf=APq-WBt3G0u6EFpFM9cGDvIkojNcnKRkEQ%3A1644205492285&source=hp&ei=tJUAYsmjD77cz7sPtYajmAg&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgCjxGLI4mE2Qot7boqXb_fNrV6yos3W&oq=&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ1AAWABgtQpoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCwAQo&sclient=gws-wiz>, 2020, hlm. 164. Diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lihat Ali Usman, “Dinamika Internal Muhammadiyah dalam Penerimaan Pancasila”, dalam <https://alif.id/read/ali-usman/dinamika-internal-muhammadiyah-dalam-menerima-pancasila-b224203p/>, diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Ali Usman, “Memantapkan Syariat Pancasila”, dalam <https://jalandamai.org/memantapkan-syariat-pancasila.html>, diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat Ali Usman, “Generasi Muda Menjaga Bhineka Tunggal Ika”, dalam <https://jalandamai.net/generasi-muda-menjaga-bhineka-tunggal-ika.html>, diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lihat Muhammad AL-Fayyadl, “Melanggar Batas-batas Bahasa: Derrida tentang Agama dan Tuhan”, dalam *Makalah,* tidak dipublikasikan, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Biasanya, para ahli—seperti Van der Leuw—melihat Islam (dan juga agama Yahudi) sebagai mewakili situasi yang pertama. Secara hampir refleks, para ahli seperti ini pun me-*reserve* situasi yang kedua—yang didominasi cinta—untuk Kekristenan. Namun, para ahli mengenai aspek esoterisme Islam (spiritualitas Islam atau tasawuf) yang lebih belakangan, seperti diwakili dengan baik oleh Annemarie Schimmel, melihat Islam sebagai tak kurang-kurang mempromosikan orientasi cinta dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Haidar Bagir, “Pengantar”, dalam John D. Caputo, *Agama Cinta Agama Masa Depan,* terj. Martin Lukito Sinaga, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. xii. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kautsar Azhari Noer, *Tasawuf Perenial, Kearifan Kritis Kaum Sufi,* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 96. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,* hlm. 101-102 [↑](#footnote-ref-27)
28. Kamaruddin, “Dimensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif HAM Islam”, dalam *Inright: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia,* Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 163. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1258/1086>, diakses 7 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-28)